

Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Di Kalimantan Barat

Jefri Ariffendi¹, Nova Elisa², Jennifer Agatha³, Suyanti⁴, Richad⁵

^{1,2,3,4} Universitas Internasional Batam

Abstract

Inflasi adalah suatu kondisi ketika harga komoditas naik secara terus menerus, terjadinya permintaan yang berlebihan terhadap suatu barang yang menutupi keseluruhan atau umum. Inflasi yang tinggi di suatu wilayah dapat melemahkan perekonomian di wilayah tersebut dan meningkatkan pengangguran di wilayah tersebut. Pengangguran adalah seseorang yang tidak bekerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Inflasi memiliki hubungan yang cukup erat dengan pengangguran. Pengangguran dapat terjadi karena inflasi. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait inflasi, masalah ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi juga dapat diatasi, seperti pengangguran yang merupakan salah satu dampak dari inflasi negatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang diteliti adalah tingkat pengangguran dan inflasi Provinsi Kalimantan Barat yang akan dikumpulkan dari periode 2013 hingga 2021.

Keywords: Inflasi, Pengangguran, Perekonomian Kalimantan Barat, Kebijakan Pemerintah.

Copyright (c) 2022 Jefri Ariffendi

✉ Corresponding author :

Email Address : aianwar@fe.unhas.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi penduduk yang sangat tinggi, menduduki peringkat ke-4 setelah China, India, dan Amerika (Ion, 2015). Dengan memiliki tingginya tingkat populasi penduduk ini menjadikan ekonomi Indonesia tidak tergolong dalam kondisi baik. Salah satu dampak dari tingginya tingkat populasi penduduk adalah meningkatnya pengangguran.

Pengangguran tidak hanya disebabkan karena tingginya tingkat populasi penduduk, pengangguran dapat terjadi karena adanya inflasi. Sebenarnya inflasi dapat memberikan keuntungan dan kerugian dalam pertumbuhan ekonomi, dengan adanya

inflasi mampu membantu ekonomi suatu negara namun juga dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. (Yurnalis, 2014)

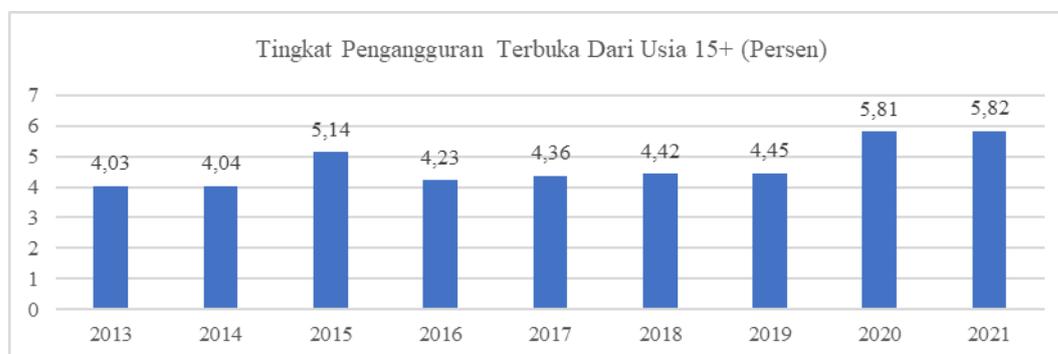
Pengangguran yang tinggi menjadi masalah untuk Negara dalam sektor ekonomi dan sosial, masalah ini perlu mendapat perhatian tinggi dari pemerintah. Terlebih lagi dengan tingginya tingkat pengangguran dalam menimbulkan permasalahan sosial, seperti terjadinya tindakan kriminalitas, dan kemiskinan. (Yurnalis, 2014). Pengangguran juga memberikan dampak dalam waktu jangka panjang, karena sangat berpengaruh dengan pembangunan suatu daerah atau negara dan pertumbuhan ekonomi. Masalah ini yang dialami Indonesia dan sulit untuk diatasi adalah pengangguran yang masih belum maksimal penyerapan tenaga kerjanya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Ilmiah, 2019)

Provinsi Kalimantan Barat, provinsi yang menduduki peringkat pengangguran ke-6 tertinggi di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk di Kalimantan Barat menyebabkan provinsi tersebut menghadapi masalah ketenagakerjaan. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa jumlah penduduk di provinsi Kalimantan Barat tidak setara dengan jumlah ketersediaan kerja yang ada.

Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan perhatian untuk mengatasi kondisi ini.

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Kota Pontianak	9,06	12,36	12,38
Kota Singkawang	6,31	8,78	9,16
Mempawah	5,11	7,55	7,71
Kubu Raya	5,50	7,14	7,02
Ketapang	4,39	7,30	6,94
Kalimantan Barat	4,35	5,81	5,82

Gambar 1. Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. Grafik Pengangguran di Kalimantan Barat dari Kelompok Usia 15+

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi di Kalimantan Barat dan manfaat dalam penelitian adalah menambah pemahaman mengenai pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat, serta mengetahui kebijakan pemerintah saat terjadinya kenaikan inflasi dan memberikan informasi sebagai dasar penelitian selanjutnya. Dengan besar harapan dapat menjadi bahan pertimbangan atau saran kedepannya dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah Kalimantan Barat.

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi dan Pengangguran

Permasalahan inflasi dan pengangguran tentu nya tidak akan lepas dari perhatian pemerintah, dilihat dari dampak permasalahan inflasi dan pengangguran yang dapat menyebabkan berbagai pengaruh negatif, tentu saja pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam membuat amandemen perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Dengan kebijakan ini permasalahan inflasi dan pengangguran dapat diatasi. (Amar & Aimon, 2015)

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral yang dibuat oleh pemerintah dalam memengaruhi penawaran uang, perubahan suku bunga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. (Utomo, 2013)

Hubungan Inflasi terhadap Pengangguran, Kemiskinan, serta Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi memiliki hubungan yang cukup erat terhadap pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan dapat terjadi karena adanya inflasi. Seperti yang kita ketahui, inflasi merupakan kenaikan harga barang ataupun jasa secara terus menerus. Peningkatan inflasi akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Ketika di suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan jumlah pekerja, maka hal tersebut akan menjadi ancaman untuk masa pasca inflasi nantinya. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah tenaga kerja mempengaruhi pendapatan suatu negara, maka jika suatu negara memiliki jumlah pengangguran yang banyak, hal tersebut merupakan suatu ancaman yang akan dihadapi oleh negara tersebut, khususnya pada masa pasca inflasi yang sangat berat.

Sama halnya dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat inflasi maka kemiskinan juga akan semakin banyak. Dikarenakan masyarakat yang pada umumnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ketika naiknya harga-harga maka kebutuhannya tidak dapat terpenuhi sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, maka akan mengatasi masalah

sosial, yaitu pengangguran dan kemiskinan pada suatu negara. Inflasi merupakan peristiwa terjadinya penurunan nilai uang dikarenakan oleh jumlah uang yang beredar terus meningkat dengan pesat dan harga-harga juga mengalami kenaikan. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara tergolong rendah, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pada saat tingkat inflasi rendah, masyarakat cenderung lebih konsumtif sehingga pendapatan masyarakat dalam suatu negara meningkat. (Susanto & Pangesti, 2021)

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat mewujudkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai dari suatu negara, salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Maka, berdasarkan hal tersebut di atas, sebaiknya perlu dilakukan kestabilan harga produk untuk mengurangi inflasi dan agar dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama dengan baik agar para pengusaha dapat termotivasi untuk menaikkan hasil produksinya, hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi ringan dapat mendorong pengusaha untuk termotivasi meningkatkan produksinya agar daya beli masyarakat meningkat sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ini tentunya menjadi suatu masalah, baik bagi orang yang bersangkutan, pemerintah, maupun suatu negara. Maka dari itu, cara yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah bekerja dengan membuka usaha sendiri, mau melakukan peningkatan terhadap mutu pendidikan masyarakat, membuka lapangan kerja yang luas, menyebarkan informasi mengenai perlunya tenaga kerja, mau berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya, menghindari gaya hidup konsumtif, dan lain sebagainya. (Utomo, 2013)

Hubungan Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi sangat mempengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi, bayangkan saja jika permasalahan ini tidak menjadi perhatian bagi pemerintah, perekonomian di suatu daerah bahkan negara dapat terpuruk.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait inflasi yang terjadi, maka permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi juga dapat diatasi, seperti hal pengangguran yang menjadi salah satu dampak dari adanya inflasi yang negatif.

Banyaknya perusahaan yang memecat karyawan karena terjadi inflasi membuat tingkat pengangguran menjadi meningkat, ditambah lagi bagi para pengangguran yang

memang belum pernah bekerja sehingga tidak mempunyai tabungan dan pemasukan, hal ini akan memberikan kesengsaraan bagi masyarakat tersebut.

Pemerintah akhirnya menggunakan kebijakan fislal untuk mengatasi inflasi dan mencapai tujuan merendahkan tingkatnya pengangguran. Seperti salah satunya yaitu mendefisitkan APBN sehingga hal tersebut dapat merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran pada saat terjadinya resesi. Sehingga saat terjadi nya inflasi pemerintah harus menerapkan anggaran surplus agar dapat mengendalikan inflasi. (Utomo, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk provinsi Kalimantan Barat dimana metodologi penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif itu memberikan gambaran mengenai keadaan dari suatu objek yang sedang diteliti dengan memecahkan masalah yang sedang diselidiki menggunakan fakta-fakta yang sudah ada.

Data penelitian ini yang dikumpulkan dan diperoleh oleh tim peneliti itu sudah disediakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik yang dimana data tersebut berhubungan dengan objek terkait. Data yang akan diteliti adalah data tingkat pengangguran dan juga tingkat inflasi dari provinsi Kalimantan Barat. Data ini akan dikumpulkan dari periode 2013 hingga 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dilihat dari tabel yang tersaji di bawah ini, tabel ini merupakan tingkat kemiskinan, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota pada wilayah Kalimantan Barat. Tabel ini merupakan data yang diambil pada tahun 2016.

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat,2016

Nama Kabupaten / Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Indonesia					
Provinsi Kalimantan Barat	4.45	5.81	5.82	0.00	0.00
Kabupaten Sambas	3.58	3.71	3.97	0.00	0.00
Kabupaten Mempawah	5.19	7.55	7.71	0.00	0.00
Kabupaten Sanggau	3.25	3.23	3.21	3.20	3.20
Kabupaten Ketapang	4.53	7.30	6.94	0.00	0.00
Kabupaten Sintang	3.20	4.50	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Kapuas Hulu	2.43	4.02	4.18	3.68	3.51
Kabupaten Bengkayang	2.71	3.91	4.42	0.00	0.00
Kabupaten Landak	2.75	3.38	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Sekadau	3.14	3.39	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Melawi	2.45	2.70	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Kayong Utara	4.00	3.71	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Kuburaya	5.62	7.14	0.00	0.00	0.00
Kota Pontianak	9.13	12.36	0.00	0.00	0.00
Kota Singkawang	6.44	8.78	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2016

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dari kurun waktu 2016-2019 terjadi penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota pada wilayah Kalimantan Barat. Seperti di Kota Pontianak mengalami penurunan sebesar 0,23% , di Kota Singkawang mengalami penurunan sebesar 1,64%. Penurunan ini terjadi karena adanya salah satu upaya yang pemerintah yang mendukung Usaha Kecil Mikro (UKM) karena sektor kegiatan usaha ini menyangkut pemberdayaan perekonomian rakyat, baik di pedesaan maupun di kota-kota. Namun terjadi kenaikan tingkat pengangguran lagi pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya kondisi pandemi yang membuat perekonomian di Kalimantan Barat bahkan di dunia melemah. Sampai saat ini keadaan tingkat pengangguran di Kalimantan Barat masih tergolong tinggi, namun ini tidak akan dibiarkan oleh pemerintah.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Marlyna, M.Si., dan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Frans Zeno, S.STP., mengikuti Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi Daerah. Tentu saja rapat ini untuk membahas pengendalian inflasi guna mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, mendukung kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah. Hal yang menjadi penyebab Kalimantan Barat memiliki tingkat pengangguran yang tinggi karena terdapat 8 isu strategis daerah yang menjadi tantangan yang harus dihadapi, yakni masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM, kualitas regulasi, birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang relatif rendah, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar, masih rendahnya kesejahteraan penduduk, terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat, belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, serta keberagaman penduduk Kalimantan Barat yang rentan akan konflik sosial.

Sehingga pemerintah menjalankan program untuk mengatasi permasalahan ini. Tahun pertama 2019, adalah tahap konsolidasi (penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah). Tahun kedua 2020 merupakan tahap percepatan (pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Tahun ketiga 2021, tahap pengembangan (optimalisasi infrastruktur daerah dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera. Tahun keempat 2022 merupakan tahap penguatan (meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja). Dan tahun kelima 2023 merupakan tahap pemantapan (meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas, masyarakat dan daya saing daerah).

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan pemerintah terhadap ancaman pengangguran akibat kenaikan inflasi di Kalimantan Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi tidak selalu memberikan pengaruh buruh ke perekonomian suatu daerah. Namun Saat terjadinya inflasi tinggi, hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam mengatasinya agar dampak dari inflasi tinggi ini dapat diminimalisir, Inflasi dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat menjadi masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Karena banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh inflasi, pemerintah Kalimantan Barat pun bergerak membuat program dan mengikuti Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi Daerah. Kebijakan pemerintah Kalimantan Barat, diharapkan permasalahan inflasi ini dapat diatasi dengan baik.

Referensi :

- Alihar, F. (2018). No Titleעלון הנוטצב. תמונת מצב. ענף הקיווי: 66, 37-39. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf
- Amar, S., & Aimon, H. (2015). PENGARUH INFLASI, KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA Asyulinda, Syamsul Amar, Hasdi Aimon. *Jurnal Kajian Ekonomi Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Kajian EKonomi*, 3(6), 1-17.
- Fatmawati, I. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow Dan Model Schumpeter. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1-12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1860>
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Ilmiah, J. (2019). *DI JAWA TIMUR*.
- Nurofik, A., Rahajeng, E., Munti, N. Y. S., Hardiansyah, A., Firmansyah, H., Sani, A., ... & Wiyono, A. S. (2021). PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI. Penerbit Insania.
- Sani, A. (2017). Sistem Manajemen Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source Senayan Library Management System (SLiMS)(Studi Kasus Perpustakaan H. Bata Ilyas STIE AMKOP Makassar). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 1(1), 47-65.
- SYARIFUDDIN, S., ILYAS, J. B., & SANI, A. (2021). PENGARUH PERSEPSI PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR DINAS DIKOTA MAKASSAR. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2).
- Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Sani, A. (2021). The Relevance of Using Social Media Applications Strategies to Increase Marketing Potential of Indonesian Maritime Tourism (Analytical Study of Tourism Journals and Online Marketing). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 8791-8799.

- Majid, A., & Sani, A. (2016). Pengaruh Pelatihan dan Supervisi Kepala Ruangan terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Diruang Rawat Inap Bedah Rumah Sakit TK. II Pelamonia Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 1(2), 310-412.
- Sani, A., & Hafidah, A. (2020). Pengaruh Shopping Life Style Dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Behavior Masyarakat High Income Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 20(3), 231-238.
- Irsan, I., & Sani, A. (2018). Praktik Manajemen Pengetahuan Pustakawan Dalam Mengembangkan Koleksi Lokal Makassar Di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 121-135.
- Munir, M., Fachmi, M., & Sani, A. (2020). Pengaruh Disiplin Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 161-170.
- Syarifuddin, U., Ilyas, G. B., Misbahuddin, M., Mustafa, H., & Sani, A. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu melalui Pemasaran Online di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2), 1-24.
- Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Amar Sani, A. S. (2021). Relevance of social media applications as a marketing strategy for Indonesian tourism destinations (literature analysis study). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5705-5712.
- Makkira, M., Syakir, M., Kurniawan, S., Sani, A., & Ngandoh, A. M. (2022). Pengaruh Stres Kerja, Komunikasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Prima Karya Manunggal Kabupaten Pangkep. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(1), 20-27.
- Asriani, A., Putri, N., Kurniawan, S., & Sani, A. (2022). Pengaruh Personal Selling terhadap Peningkatan Penjualan Alat Tulis pada CV. Etalase Mitra Jaya di Wajo pada Masa Lockdown Pandemi Covid 19. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(1), 13-19.
- Ion, O. A. T. (2015). 2015 World Population Data Sheet with a special focus on women's empowerment. *Population Reference Bureau*.
- Mahzalena, Y. (2019). 1742-4533-1-Pb. *Ekonomi Regional Unimal*, 02(April), 37-50.
- Permadhy, Y. T., & Sugianto. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Ikra-Ith Ekonomika*, 2(3), 54-63. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/583>
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327-340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Utomo, F. W. (2013). Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. *Jurnal Ilmiah*, 1-22.
- Yurnalis. (2014). Pengaruh inflasi terhadap pengangguran di kabupaten nagan raya. *Economic*, 16(17), 17-22.